

RINGKASAN

Shonya Putri Asalisa. Prosedur Pemusnahan Barang Milik Negara (BMN) Eks Tegahan Bea dan Cukai Pada Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara. Dosen Pembimbing Endro Sugiartono, S.E., M.M.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai peraturan perundang-undangan. Struktur organisasinya mencakup Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dengan empat Kasubdit, enam belas Kasi, satu Kasubag TU, dan Jabatan Fungsional yang mendukung tugas-tugasnya. Unit-unit ini memiliki peran yang terdefinisi dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.010/2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 188/KN/2022. Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang barang milik negara, kekayaan negara lain-lain, dan piutang negara. Salah satu fungsinya adalah menyiapkan pelaksanaan kebijakan terkait barang milik negara, kekayaan negara lain-lain, dan piutang negara. Kasubdit I, II, III, dan IV memiliki tugas melaksanakan penyiapan koordinasi kegiatan perencanaan kebutuhan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah tangana, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan penatausahaan serta akuntansi barang milik negara.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan, Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik atau kegunaan Barang Milik Negara/Daerah. Pemusnahan adalah kegiatan untuk menghilangkan wujud awal dan sifat hakiki suatu barang. Usulan pemusnahan yang disetujui dapat dari hal yang memiliki kriteria busuk, kadaluarsa, dilarang diekspor atau impor, tidak mempunyai nilai ekonomis atau berdasarkan peraturan perundang-undangan harus dimusnahkan. Saat menjelang akhir tahun 2024, beberapa Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC) banyak mengajukan permohonan persetujuan pemusnahan BMN di akhir

tahun 2024, dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang berkaitan dengan regulasi, target kinerja, serta dinamika pengelolaan BMN. Beberapa fenomena yang terjadi banyak Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC) yang memiliki target tahunan yang harus dipenuhi, termasuk dalam pengelolaan BMN para Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC) perlu menyelesaikan pengelolaan BMN yang telah teridentifikasi di awal tahun agar bisa menutup laporan keuangan atau anggaran yang terkait dengan pemeliharaan dan penghapusan aset, juga penundaan proses inventarisasi dari Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC) seringkali menginventarisasi BMN pada akhir tahun, terutama jika inventarisasi tersebut melibatkan BMN yang sudah tidak lagi digunakan atau dalam kondisi rusak. Oleh karena itu, permohonan pemusnahan baru diajukan setelah hasil inventarisasi menunjukkan aset-aset yang harus dimusnahkan. Penutupan tahun anggaran dari banyaknya Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC) yang memanfaatkan akhir tahun untuk menyelesaikan urusan administratif, termasuk pemusnahan BMN agar tercatat dalam tahun anggaran yang sedang berjalan. Konsekuensinya, keterlambatan proses, artinya proses yang terhambat atau antri yang menyebabkan keterlambatan dalam proses pemusnahan BMN, yang bisa berpengaruh dalam pencapaian target dan tujuan pengelolaan BMN secara keseluruhan. Ketidakpastian bagi pemohon artinya pada instansi terkait merasa kebingungannya meningkat karena tidak mendapatkan update yang jelas tentang status permohonan mereka. Inefisien dalam pengelolaan proses artinya tana pemahaman yang jelas tentang tahapan yang sedang berlangsung, proses administrative menjadi kurang efisien dan memperlambat penyelesaian pekerjaan.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi keterlambatan proses, ketidakpastian bagi pemohon, dan inefisien dalam pengelolaan proses pemusnahan BMN eks Tegahan Bea dan Cukai dengan melibatkan penggunaan flowchart atau diagram aluar proses sebagai salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk memperjelas tahapan-tahapan pemusnahan BMN dengan menggunakan flowchart atau diagram alur proses. Dengan menerapkan strategi penggunaan flowchart atau diagram aluar proses Pemusnahan BMN eks Tegahan Bea dan

Cukai, Dit PKN dapat memperbaiki efisiensi operasionalnya. Penggunaan flowchart yang menggambarkan secara visual tahapan yang harus dilalui, dengan alat ini setiap Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC) memiliki gambaran yang jelas mengenai posisi mereka dalam proses dan apa yang harus dilakukan selanjutnya, koordinasi yang lebih baik antar Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC) yang terlibat dalam proses pemusnahan BMN sangat diperlukan untuk mengurangi kesalahan informasi dan meningkatkan efisiensi penyelesaian permohonan.